



Judul : Pertimbangkan aspek psikologis warga Jakarta, DPR belum kompak soal isu pemindahan Ibukota
Tanggal : Sabtu, 03 Agustus 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pertimbangkan Aspek Psikologis Warga Jakarta

DPR Belum Kompak Soal Isu Pemindahan Ibukota

Senayan serius menyoroti isu pemindahan Ibukota. Anggota Dewan yang setuju menggalang dukungan agar daerah jagoannya dipilih jadi ibukota baru. Yang lainnya, mengingatkan pemerintah agar tidak sembrono memindahkan warga Jakarta ke daerah baru.

ANGGOTA Komisi VII DPR Ihwan Datu Adam menilai, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) siap menjadi Ibukota Indonesia. Kaltim dinilai telah memiliki infrastruktur, sumber daya alam, serta masyarakat yang siap menyambut perpindahan Ibukota ke provinsi tersebut.

"(Calon Ibukota baru) sudah mengerucut jadi dua provinsi, yakni Kaltim dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Kami berjuang supaya ibu kota pindah ke Kaltim, karena hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, Kaltim ini sangat layak, dan infrastrukturnya sudah sangat siap," ujar Ihwan di sela-sela

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Kalimantan Selatan (Kalsel), kemarin.

Lebih lanjut, Ihwan mengatakan, Kaltim merupakan provinsi penyumbang devisa terbesar, sekitar Rp 500 hingga 600 triliun per tahun. Karenanya, pemerintah bisa mencari anggaran pemindahan Ibukota melalui pemotongan devisa dari Provinsi Kaltim sebesar Rp 50 triliun per tahun.

"Jika devisa Kaltim dipotong Rp 50 triliun selama 10 tahun, kita dapat membangun Ibukota baru. Lahan di Kaltim sangat besar, dan Pemda Kaltim bisa menyiapkan lahan seluar 300 ribu hektare di Kawasan Bukit

Soeharto," jelas Anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Mengenai pemilihan Bukit Soeharto sebagai bakal calon Ibukota baru, Ihwan menilai, kawasan tersebut sangat strategis karena diapit oleh dua kota, yakni Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, Kawasan Bukit Soeharto juga sangat hijau dan layak untuk dijadikan area lalu lintas pemerintahan negara.

Legislator asal Kaltim ini mengaku telah menggalang dukungan seluruh pemangku kepentingan agar Kaltim dipilih Presiden Jokowi sebagai Ibukota baru. Namun, ia menyadari, keputusan yang akan diambil Presiden merupakan keputusan politik, sehingga kalangan masyarakat harus berperan aktif dalam mengkampanyekan Kaltim sebagai daerah yang layak untuk dijadikan Ibukota Negara.

"Walikota dan bupati di Kaltim

menyambut baik, dan sangat siap bila hal itu terwujud. Sebagai Anggota DPR, saya akan berjuang untuk meyakinkan banyak pihak bahwa Kaltim merupakan provinsi yang paling tepat untuk dijadikan Ibukota negara," tandasnya.

Anggota Komisi XI Nur Purnamasidi memiliki pandangan berbeda. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang wacana pemindahan 1,6 juta penduduk DKI Jakarta ke Ibukota baru dalam kurun waktu lima tahun. Selain pembangunan fisik, masih banyak aspek yang harus disiapkan, di antaranya aspek psikologis masyarakat Indonesia dalam menghadapi isu tersebut.

"Dari timeline yang disampaikan Bappenas, saya belum melihat adanya persiapan terkait sosial budaya. Tahun 2021, dan 2022 ini, semuanya hanya menyangkut kesiapan fisik. Bagaimana menyiapkan landasan sosial budayanya,

misalnya 15 sampai 20 tahun ke depan, potensi apa yang harus disiapkan untuk infrastruktur ekonomi masyarakat. Ini harus disiapkan," jelas dia.

Nur Purnamasidi menambahkan, perkembangan informasi yang begitu cepat dan tidak memiliki esensi keberimbangan akan membentuk opini yang mengganggu eksekusi isu pemindahan Ibukota. Mental masyarakat perlu dijaga, apalagi pemerintah bertaruh dengan 1,6 juta penduduk yang akan mereka pindahkan.

"Jakarta itu orangnya sangat terbuka, mungkin orang Dayak juga sama. Tapi, ada titik di mana persaingan ke depan sangat keras, ini harus kita pikirkan juga. Makanya, saya bilang ke Pak Menteri, tolong dipikirkan masak-masak, targetnya jangan hanya 5 tahun, tapi antara 10 tahun sampai 15 tahun. Bukan hanya pembangunan fisik yang jadi perhatian," tandasnya. ■ ON